

Parodi Masa Lalu dan Masa Kini Novel *Pangeran Diponegoro* Karya Remy Sylado dalam Perspektif Metafiksi Historiografis

Ratino¹

Onok Yayang Pamungkas²

^{1,2} Magister PBSI Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Corresponding author: esemupaitmadu@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis novel *Pangeran Diponegoro* karya Remy Sylado melalui perspektif metafiksi historiografis. Konsep metafiksi historiografis yang mekankan adanya kegandaan, ironi, dan dekonstruksi representasi sejarah. Novel tersebut memadukan fakta sejarah dan elemen fiktif untuk menampilkan peristiwa menjelang Perang Jawa pada 1825-1830. Hasil analisis menunjukkan bahwa Remy Sylado menggunakan parodi dalam mengonstruksi ulang masa lalu secara tidak nostalgis, melainkan reflektif terhadap realitas sosial-politik di masa kini. Isu yang diangkat dalam novel ini mengenai mafia tanah, mafia pajak, sentimen anti-Cina, gratifikasi seks, pemimpin boneka, dan pejabat oportunistis sebagai bentuk representasi yang masih terjadi di Indonesia pada masa kini. Selain itu, penggunaan tokoh fiktif dalam novel ini berfungsi untuk mengaitkan adat, budaya, politik, dan dinamika sosial masa kolonial dengan narasi utama. Dalam penelitian ini juga ditemukan fungsi edukatif novel dalam menumbuhkan nasionalisme, pemahaman sejarah, hingga penguatan karakter. Novel ini juga menghadirkan Trigatra Bangun Bahasa melalui bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing dalam konteks historisnya. Secara umum, novel ini menjadi bukti penting bahwa karya sastra mampu merefleksikan kontinuitas sejarah sekaligus mengkritisi struktur kekuasaan dalam bingkai metafiksi historiografis.

Kata kunci: *edukatif, metafiksi historiografis, parodi, masa kini, masa lalu*

Abstract

This study analyzes Remy Sylado's novel Pangeran Diponegoro through a historiographic metafiction perspective. The concept of historiographic metafiction that emphasizes the existence of doubleness, irony, and deconstruction of historical representation. The novel combines historical facts and fictional elements to present the events leading up to the Java War in 1825-1830. The results of the analysis show that Remy Sylado uses parody in reconstructing the past in a way that is not nostalgic, but rather reflective of the socio-political reality of the present. The issues raised in this novel are about land mafia, tax mafia, anti-Chinese sentiment, sexual gratification, puppet leaders, and opportunistic officials as forms of representation that still occur in Indonesia today. In addition, the use of fictional characters in this novel serves to link customs, culture, politics, and social dynamics of the colonial period with the main narrative. This study also found the novel's educational function in fostering nationalism, historical understanding, and strengthening character. This novel also presents the Trigatra Bangun Bahasa: through Indonesian, regional languages, and foreign languages within their historical context. Overall, this novel serves as important evidence that literary works can reflect historical continuity while simultaneously critiquing power structures within a historiographic metafiction framework.

Keywords: *educational, historiographic metafiction, parody, present, past*

Pendahuluan

Sejarah merupakan peristiwa yang sudah terjadi dan meninggalkan kesan bagi masyarakat secara turun-temurun. Hal tersebut diceritakan sebagai ingatan yang disampaikan secara lisan maupun tulisan. Pelaku yang mengalami peristiwa sejarah tentu akan menceritakan atau menuliskannya sesuai versi mereka. Tahun 1825 – 1830 merupakan tahun penting dalam sejarah Jawa karena terjadi peristiwa besar yang memengaruhi peta kolonialisme Belanda di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Peristiwa tersebut dikenal sebagai peristiwa Perang Jawa. Banyak sejarawan mengabadikan peristiwa penting tersebut dalam berbagai sudut pandang berbeda dan mungkin saling bertentangan. Walaupun begitu, mereka tentu memiliki argumentasi untuk menguatkan dan dalil pemberian. Salah satu bentuk lain dari pendokumentasian lain adalah lewat karya sastra, salah satunya adalah novel *Pangeran Diponegoro* yang ditarik oleh Remy Sylado, untuk selanjutnya disingkat PD (2008). PD merupakan novel berlatar belakang sejarah sebelum dan awal meletusnya Perang Jawa, sebuah karangan fiksi yang sangat menarik karena memadukan unsur sejarah dan imajinasi sekaligus. Di dalam PD disajikan fiksi yang memuat unsur sejarah, kritikan, narasi dialogis, hingga menghadirkan masa lalu yang diparodikan sedemikian rupa. Hal tersebut menjadi lebih menarik karena dapat dikaji secara mendalam sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Linda Hutcheon mengenai metafiksi historiografis.

Seperti yang dikatakan oleh Hutcheon (2004: 23-24) bahwa representasi naratif-fiktif-historis sedang mengalami kajian subversif yang sama dalam bentuk posmodern paradoks yang disebut sebagai "metafiksi historiografis". Berdasarkan apa yang dipaparkan Hutcheon (2004: 147) parodi sering disebut sebagai kutipan ironis, *pastiche*, daur ulang, atau intekstualitas biasanya dianggap sentral dalam pomodernisme, baik karena serangan maupun pembelaannya. Bagi pengarang, posmodern dikatakan meliputi pengubrak-abrik citra masa lalu dengan cara sedemikian rupa sehingga memperlihatkan sejarah representasi diparodikan. Namun, perulangan parodis masa lalu seni ini tidak bersifat nostalgis, tetapi selalu kritis. Sebagai bentuk representasi ironis, parodi dikodekan secara ganda dalam pengertian politik: parodi melegitimasi dan meruntuhkan apa yang diparodikan. Perulangan ironis parodi juga menawarkan tanda kesadaran diri tertentu tentang alat-alat legitimasi ideologis kebudayaan kita.

Menurut Gallagher dan Greenblatt (2001) sastra seringkali menghadirkan kembali konflik historis seperti kolonialisme, absolutisme kekuasaan, dan marginalisasi sesuai konteks zaman dan relevan. Sastra berfungsi sebagai ruang dimana sejarah "berulang" karena kondisi sosial yang melahirkannya belum mengalami transformasi mendasar. Menurut Montrose dalam Newton (1997) sastra tidak hanya mereproduksi ideologi dominan, tetapi menyimpan potensi subversif melalui ambiguitas makna dan strategi representasi. Hal tersebut menyebabkan pengulangan sejarah tidak selalu pasif, melainkan dapat berfungsi sebagai kritik terhadap ketimpangan sosial. Menurut Veeser (1989) *new historicism* merupakan pendekatan interdisipliner yang mengaburkan batas antara sastra dan sejarah, serta menolak klaim objektivitas dalam penulisan sejarah maupun kritik sastra. Menurut Wahyuni (2023) teks sastra sebagai dokumen sosial tidak terlepas dari konteks politik, ekonomi, keadaan sosial masa itu sehingga karya fiksi menjadi media representasi pengalaman sejarah yang kompleks. Penelitian yang dilakukan Imayah (2024) juga mengatakan bahwa membaca teks sastra dan teks sejarah untuk mendeskripsikan realitas politik pra kemerdekaan yang direpresentasikan dalam narasi fiksi menunjukkan adanya korelasi narasi sastra dan narasi historis. Dalam penelitian Sugiarti (2013) juga dikatakan bahwa pendekatan ini menyingkap bagaimana teks sastra dapat merepresentasi relasi ideologi dan kekuatan sosial dalam konteks

sejarah. Ardhianti (2016) menekankan relevansi sosial, politik, budaya yang ada dalam narasi karya sastra memperlihatkan dinamika sejarah kolonialisme dan perjuangan kemerdekaan. Menurut Sahliyah (2025) yang meneliti novel *Kubah* dengan pendekatan *new historicism* mengatakan bahwa sejarah, ekonomi, dan budaya direpresentasikan dengan merujuk pada teks nonsastra untuk menarik korelasi historis. Menurut Li (2025) menegaskan keterkaitan teks klasik dengan konteks sejarah, budaya dan kekuasaan, misalnya dalam interpretasi peran gender di ke-16 dan ke-17.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis parodi masa lalu dan masa kini yang ada di dalam PD. Penelitian ini berusaha mengungkapkan bahwa sejarah yang di dalam novel merupakan sejarah masa lalu yang kemudian terjadi berulang di masa kini. Kemudian tujuan lainnya adalah mengungkapkan adanya fakta sejarah dan fakta fiktif yang saling disandingkan. Selain itu, ingin menunjukkan nilai edukatif dalam novel yang bisa dijadikan pembelajaran.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan hermeneutika Paul Ricoeur yang memandang teks sebagai wacana otonom dan terbuka terhadap adanya kemungkinan berbagai penafsiran dan makna melalui distansiasi antara teks dan konteksnya (1981). Menurut Ricoeur (1991) teks sastra mengalami distansiasi, yaitu pemisahan makna dari intensi pengarannya dan juga konteks asalnya, sehingga terbuka ruang untuk pembaca baru dengan horizon pembaca dan konteks yang lebih kini, dengan kata lain menghadirkan dialektika masa lalu dan masa kini. Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk mengkaji metafiksi historiografis yang menempatkan teks sastra tidak hanya sebagai representasi sejarah, tetapi juga sebagai ruang refleksi ideologis dan bersifat kritis.

Objek material dalam penelitian ini adalah novel *Pangeran Diponegoro*, sedangkan objek formalnya adalah parodi masa lalu dan masa kini, relasi fakta sejarah dan fakta fiktif, serta nilai edukatif yang terletak di dalamnya. Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer yang diambil dari kutipan naratif maupun dialog yang merepresentasikan hubungan masa lalu dan masa kini, fakta sejarah dan fakta fiksi, serta nilai edukatif. Adapun data sekunder diperoleh dari teori, jurnal ilmiah, dan teks sejarah relevan. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, membaca intensif, pencatatan, dan pengodean data terfokus (Creswell, 2014).

Ada tiga tahapan hermeneutika dalam menganalisis data menurut Ricoeur, yaitu 1) *explanation*, penjelasan guna mengidentifikasi struktur maupun unsur naratif teks, 2) *understanding*, pemahaman guna menafsirkan makna simbolik dan ideologis dengan mempertimbangkan konteks maupun sejarahnya, 3) *appropriation*, yang merupakan tahap hermeneutik kritis guna menarik makna teks sesuai konteks masa kini (Fithri, 2014).

Keabsahan data dijaga melalui konsistensi penafsiran, ketepatan rujukan teori, dan keterkaitan logis antara data, analisis, dan simpulan sehingga interpretasi tidak bersifat subjektif semata, melainkan berbasis teks dan kerangka teoretis yang jelas.

Hasil

Masa Lalu dan Masa Kini

Berdasarkan analisis hermeneutika terhadap PD, ditemukan bahwa teks tersebut bukan narasi tunggal melainkan sebagai ruang dialogis antara masa lalu dan masa kini melalui strategi metafiksi historiografis. Novel tersebut mampu memadukan fakta sejarah

dan fakta fiktif secara ironis sekaligus parodis menampilkan keberulangan masalah sosial politik dalam konteks yang berbeda. Temuan awak menunjukkan bahwa isu-isu penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, degradasi moral para penguasa tidak hanya mengungkap realitas masa colonial, namun masih relevan hingga kini.

Novel PD menjadi representasi adanya sejarah yang berulang dalam bentuk yang hampir sama/identik, namun berbeda zaman. Hal yang disoroti dalam PD yang hubungannya dengan masa lalu dan masa kini dapat dijabarkan secara singkat melalui tabel berikut.

No.	Masalah	Tokoh	Kode	Halaman
1	Mafia Tanah	Danurejo IV/ Sumodipuro	MT.1	NPD.117
2	Mafia Pajak	Mutinghe Wironegoro	MP.1	NPD.117, 183 NPD.233, 234, 239, 244, 249, 309, 380, 385
3	Sentimen Anti-Cina	Danurejo IV	AC.1	NPD.152, 232, 367, 400
4	Gratifikasi Seks	Smissaert, Van Rijns	GS.1	NPD.297, 370
5	Pemimpin Boneka	Ibnu Jarot, Menol	PB.1	NPD.290
6	Pejabat Oportunist dan Mabuk Kekuasaan	Danurejo IV	PO.1	NPD.146, 199

Tabel 1 Masa lalu dan masa kini dalam PD

Masa lalu dan masa kini yang tampak pada tabel 1 dijelaskan mengenai permasalahan terdapat enam masalah utama beserta tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya. Sebenarnya masih ada permasalahan lain yang terdapat di dalamnya, namun hanya permasalahan tersebut yang akan dibahas lebih dalam penelitian ini.

Mafia Tanah

Parodi yang disajikan dalam bentuk sesuatu yang identik muncul melalui perkataan maupun tindakan tokoh alam PD. Permasalahan yang muncul pun kompleks dari hal yang menyangkut cara pandang hingga kebiasaan yang tidak sesuai norma sosial masyarakat. Permasalahan pertama yang diangkat adalah mengenai mafia tanah, yang dimunculkan melalui tokoh Danurejo IV dan Mutinghe seperti pada data MT.1 NPD.117, 183. Lebih jelasnya lihat Diagram 1 Masalah mafia tanah.

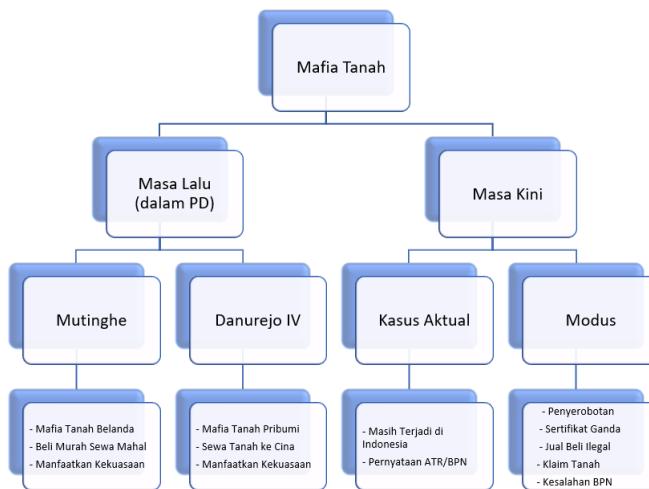


Diagram 1 Masalah mafia tanah

Mutinghe diceritakan merupakan orang kaya yang kondang sebagai mafia tanah. Ia pernah membeli tanah di daerah Pamanukan, Indramayu, Kandanghaur dengan harga murah kemudian tanah tersebut disewakan kepada orang Cina dengan harga mahal. Ia juga memiliki tanah yang luas di Pekalongan. Namun, di akhir hayatnya Mutinghe mati di Pekalongan dengan catatan tragis meninggalkan banyak utang. Selain itu, setipe dengan Mutinghe yang merupakan representasi Belanda, muncul juga nama pribumi yang tidak kalah mencoloknya, yaitu Danurejo IV (Sumodipuro). Rekam jejak Danurejo IV juga mafia tanah yang menyewakan tanah kepada orang-orang Cina. Secara licik Danurejo IV memengaruhi Sultan Hamengku Buwono IV memberikan hak penyewaan tanah tanpa syarat pada orang-orang Cina. Namun, di balik ide tersebut Danurejo IV memungut uang untuk pribadinya. Mutinghe dan Danurejo memanfaatkan kekuasaan dan koneksinya untuk melanggengkan bisnis mafia tanahnya.

Kejadian masa lalu tersebut identik dengan masa kini mengenai mafia tanah. Banyak kasus mafia tanah terjadi di Indonesia, bahkan sekelas Nusron Wahid yang notabene Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengatakan secara satir bahwa mafia tanah akan tetap eksis sampai kiamat kurang dua hari. Penegakan hukum bukan satu-satunya untuk mengatasi, tetapi lebih ke keteguhan moral aparaturya yang tidak mau diajak kongkalikong (Purnama, 2025). Menurut Permadi (2023) kasus mafia tanah terjadi akibat permainan mafia tanah dengan memalsukan dokumen dan membuat informasi palsu agar mendapatkan legalitas.

Menurut Mahfud MD ada 11 modus mafia tanah: 1) tanah diserobot karena tidak dikuasai maupun ditempati walaupun sudah bersertifikat, 2) tanah yang sudah dikuasai masyarakat dan bersertifikat, namun tidak punya bukti kepemilikan, 3) tanah yang sudah dihuni secara turun-temurun, namun tidak bersertifikat, tiba-tiba terbit sertifikat atas nama pihak lain, 4) tanah yang dihuni turun-temurun dan tidak memiliki sertifikat sebab dulu tidak diwajibkan bersertifikat, kemudian diperjualbelikan oleh pihak tertentu ke pihak ketiga, 5) klaim tanah adat di atas tanah yang sudah bersertifikat milik masyarakat, 6) kesalahan kantor pertanahan baik di kabupaten maupun provinsi dalam penerbitan sertifikat tanah, dari batas tanah maupun pemetaan sehingga terjadi tumpeng tindih, 7) tanah milik BUMN/ BUMD dikuasai tanpa hak oleh orang besar berpengaruh, 8) terbitnya SHM atas nama masyarakat di tanah milik pemerintah, 9) tanah pemerintah dikuasai masyarakat, ketika diusir tidak bisa, 10) penguasaan tanah oleh seseorang dengan

melebihi batas dengan membeli dari masyarakat disertai ancaman, 11) tanah dialihkan ke pihak ketiga (Hadi, 2023)

Mafia Pajak

Tidak lupa di dalam PD juga disuguhkan mengenai mafia pajak versi zaman dulu dengan istilah *pacumpleng* yang dilakukan para pegawai Belanda. Hal tersebut menjadi pemicu kemarahan Pangeran Diponegoro karena melihat sendiri rakyatnya dibebani pajak secara tidak manusiawi. Para pemungut pajak cenderung menggunakan kekerasan dan juga memanfaatkan pajak untuk menumpuk kekayaan pribadi seperti yang dilakukan Wironegoro. Hal tersebut dijabarkan melalui bukti data MP.1 NPD.233, 234, 239, 244, 249, 309, 380, 385. Lihat juga Diagram 2 Masalah mafia pajak.



Diagram 2 Masalah mafia pajak

Diceritakan dalam PD bahwa Wironegoro mengenal Pangeran Diponegoro sedari kecil, bahkan pernah dipukulnya. Pada saat dewasa, Wironegoro bersekolah di kemiliteran Semarang dan kemudian oleh Belanda ditugaskan menjadi pemungut pajak/ *pacumpleng*. Wironegoro memiliki banyak kaki tangan penagih pajak dan identik dengan kekerasan jika tidak membayarnya. Bahkan anak buah Wironegoro pernah berhadapan langsung dengan Pangeran Diponegoro dan terjadi perkelahian yang dimenangkan Pangeran Diponegoro. Kekalahan itu kemudian dilaporkan oleh anak buah Wironegoro pada Wironegoro. Pada saat itulah Wironegoro teringat masa kecilnya Bersama Pangeran Diponegoro, dan masih menyimpan dendam karena berkali-kali dikalahkan dalam permainan. Dalam pandangan Pangeran Diponegoro, tokoh Danurejo IV dan Wironegoro itu diibaratkan ular karena kelicikannya dalam menindas rakyat jelata dalam hal *pacumpleng*.

Hal tersebut identik dengan keadaan masa kini mengenai mafia pajak yang kasusnya makin miris hingga kini. Beberapa kasus besar dari tahun ke tahun semakin

mengemuka dan seolah tidak ada habisnya. Kasus besar seperti kasus pajak Gayus Tambunan di tahun 2009 yang memiliki kekayaan hingga 100 miliar dan kasus manipulasi laporan keuangan sebanyak 27 orang. Di tahun 2011 muncul kasus Bahasyim A. tentang suap pajak 1 miliar dan kepemilikan harta tidak wajar 61 miliar. Kasus Tomy Hindratmo di 2013 OTT suap PT Bhakti Investama senilai Rp 280 juta. Kasus muncul lagi di 2019 tentang Jaguar-Bentley yang merupakan kasus suap restitusi perusahaan otomotif Rp 5,3 miliar, Rp 2,7 miliar, dan US\$ 96.375. Kasus yang menghebohkan juga muncul kembali di tahun 2023 mengenai Rafael Alun Trisambodo yang terjerat harta tidak wajar sebanyak Rp 56,1 miliar dan transaksi Rp 500 miliar dari 40 rekening yang dicurigai (Widyatama, 2025). Pajak merupakan gejala sosial yang ada di dalam masyarakat, tanpa adanya masyarakat maka tidak mungkin ada pajak, masyarakat dalam konteks ini adalah masyarakat hukum. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang dominan dan menjadi fokus sejak awal tahun 1980-an guna memperkuat kemandirian fiscal. Bahkan, sejak Repelita IV penerimaan pajak semakin kuat dan dilaporkan dua kali lipat dibandingkan sektor minyak dan gas. (Putri, 2021).

Sentimen Anti-Cina

Sentimen anti-Cina di dalam PD dimunculkan melalui tindakan maupun perkataan yang tercermin pada data AC.1 NPD.152, 367, 377, 400 seperti pada kutipan *"Ganyang Cino! Pateni wae Cinane kuwi!"*. Pernyataan tersebut keluar dari mulut penonton acara pertandingan adu ketangkasannya lembing antara Pangeran Diponegoro dan Ket Wan. Hal tersebut membuat gusar Eyang Condro yang merupakan sesepuh masyarakat pecinan. Sentimen anti-Cina merebak karena alasan perbedaan rezeki sehingga menimbulkan jurang sosial. Eyang Condro khawatir apabila hal-hal buruk terjadi pada masyarakat pecinan. Ulah Danurejo IV dan Tan Jin Sing membuat Eyang Condro tidak hati pada pihak Pangeran Diponegoro, sehingga dengan Eyang Condro mengklarifikasi bahwa tidak semua orang Cina seperti Tan Jin Sing yang curang dan melakukan kejahatan tersembunyi.

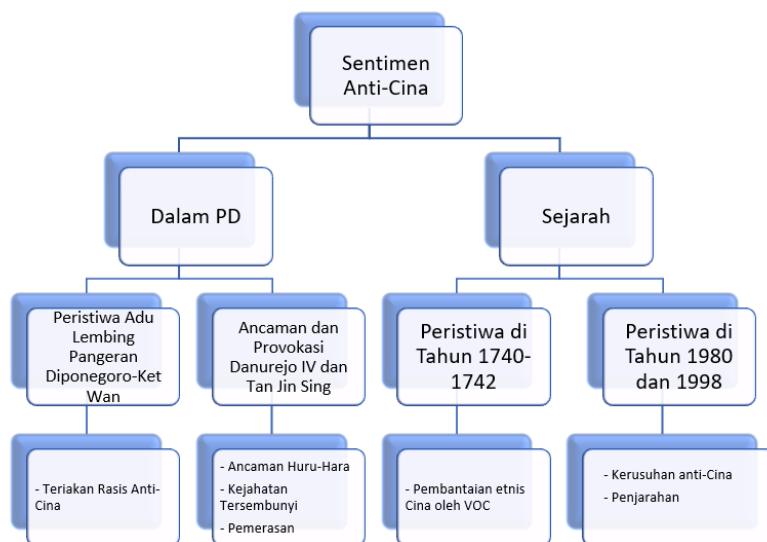


Diagram 3 Masalah sentimen anti-Cina

Di dalam data AC.1 NPD.379 ketakutan Eyang Condro selaku sesepuh Cina dimungkinkan karena sejarah masa lampau seperti yang dikatakan Pangeran Diponegoro bahwa di tahun 1742 Pakubuwono II merestui orang Cina di Lasem, yaitu Tan Pan Ciang dan Uy Ing Kat membentuk tentara Cina guna menyerang Belanda di Semarang. Namun,

secara diam-diam Pakubuwono II membocorkan rencana tersebut pada pihak Belanda agar memperoleh bantuan karena takut singgasananya direbut oleh Cucu Sunan Mas. Hal tersebut tersebut mengakibatkan tentara Cina dibantai oleh tentara Belanda di Semarang. Pada data AC.1 NPD.400 juga diceritakan bahwa Danurejo IV dan Tan Jin Sing memeras masyarakat Cina untuk memberikan upeti pada Belanda. Dalam menarik upeti tersebut Danurejo IV menggunakan ancaman anti-Cina dengan menakut-nakuti akan terjadi huru-hara anti-Cina.

Dalam sejarah tercatat peristiwa perlawanan etnis Cina terhadap Belanda (VOC) di Muara Angke, Batavia terjadi pada 1740 ribuan orang terbunuh. Saat itu muncul sosok pahlawan bernama Kwee Lak Kwa. Hal tersebut berimbas pada etnis Cina yang berada di Semarang yang lebih ketat diawasi dengan cara melokalisasi di seputaran Kali Koping (Soetjipto, 2024). Kerusuhan anti-Cina di masa modern muncul pada tahun 1980 yang berawal dari insiden kecil di Solo antara pemuda Jawa dan pemuda Cina yang berkembang menjadi konflik ras. Ditengarai hal tersebut juga karena adanya provokasi, kesenjangan ekonomi, sentimen sosial, dan ditunggangi kepentingan politik. Konflik pun meluas hingga Semarang yang menyebabkan terjadi penjarahan di berbagai tempat, pembakaran toko maupun kendaraan, serta pembakaran toko yang menimbulkan trauma tersendiri bagi warga keturunan Cina (Wigarani, 2019). Selain itu, tragedi 1998 juga membekaskan sentimen anti-Cina saat itu. Krisis moneter yang berkepanjangan, kemudian menjalar ke yang lain, pada kurun waktu 13 – 15 Mei 1998 suasana kerusuhan muncul dimana-mana dan demo juga terjadi. Pada 12 Mei 1998 ada empat mahasiswa Trisakti meninggal akibat tertembak. Kemudian pada 13 Mei 1998 terjadi kerusuhan di berbagai tempat. Situasi kian memanas di tanggal 14 Mei 1998 dengan menysar etnis Cina dengan adanya kerusuhan, pembakaran toko, pembakaran rumah, hingga pelecehan seksual. Kejadian puncak pada 15 Mei 1998 di Mall Kelnder dan Plaza Ciledug yang merupakan pusat perbelanjaan dijara dan dibakar hingga mengakibatkan 273 orang meninggal (Azhari, 2024).

Gratifikasi Seks

Masalah lain yang muncul berkisar adanya gratifikasi seks seperti yang tercermin pada data GS.1 NPD.297, 370. Vila Bedoyo menjadi ikon mengenai kebejatan pejabat Belanda dan kroninya dengan acara mabuk dan seks bebas. Smissaert selaku residen dan antek-anteknya memiliki moral bobrok karena sering membawa perempuan dalam lingkup Vila Bedoyo. Dijelaskan pula dalam PD bahwa Smissaert memiliki kebiasaan hal-hal duniawi, seperti bermain Wanita, foya-foya, dansa-dansi, dan miras. Semua pekerja seks baik totok maupun indo telah dicobanya.

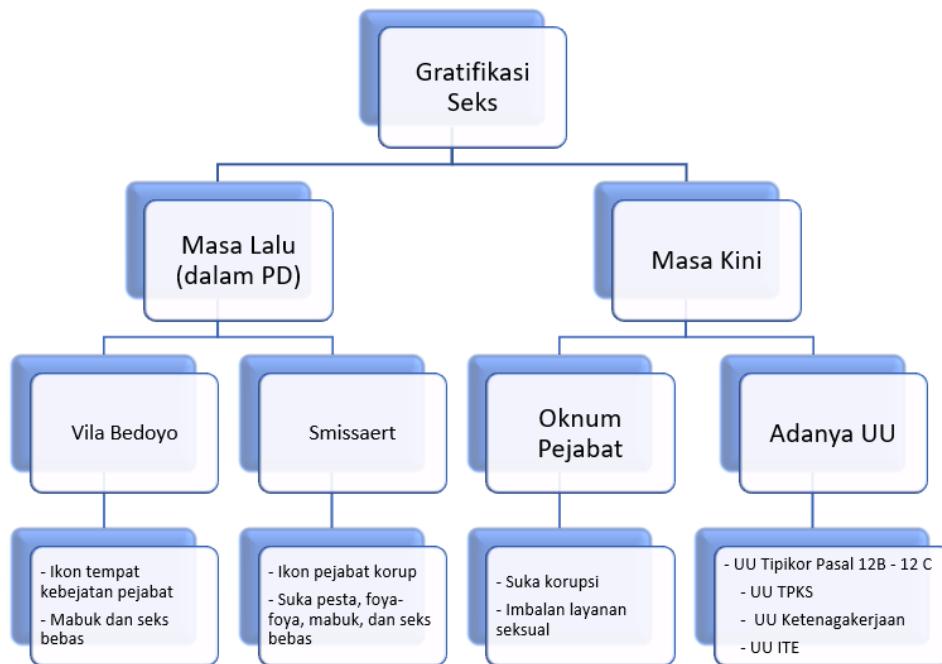


Diagram 4 Masalah gratifikasi seks

Gratifikasi seks merupakan masalah yang masih berhubungan dengan tindak kejahatan korupsi. Adanya gratifikasi seks ditengarai bahwa muncul karena keinginan pejabat itu sendiri dalam bentuk layanan seksual dan alasan lainnya karena pejabat sulit disiap menggunakan uang sehingga gratifikasi seks dijadikan alternatif. KPK sudah mengkaji permasalah tersebut dengan merujuk pada *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) (Wahyudi, 2019). Dalam praktiknya gratifikasi seks digunakan dalam transaksi bisnis atau politik yang melibatkan aparat pemerintah dan juga birokrasi (Kristanto, 2022). Gratifikasi seks mengacu pada memberikan imbalan berupa pelayanan seksual dengan tujuan untuk mengamankan kepentingan maupun tujuan tertentu. Hal tersut terjadi akibat relasi yang tidak seimbang, misalkan pejabat dengan pengusaha, atasan dan bawahan, hingga masuk pada ranah pelayanan publik. Adapun dasar hukum dalam menindak gratifikasi seks adalah UU Tipikor yang diatur dalam Pasal 12B dan 12C UU No. 20 Tahun 2001. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual No. 12 Tahun 2022. Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Admin, 2024).

Pemimpin Boneka

Pemimpin boneka juga tidak lepas dari pembahasa PD yang disampaikan secara tersurat pada data PB.1 NPD.290 yang mengatakan bahwa para sultan merupakan boneka-boneka Belanda maupun Inggris. Baik Ibnu Jarot dan Menol yang merupakan sultan saat itu masih berusia sangat muda sehingga masih memerlukan perwalian dari pihak keluarga dan juga pihak yang ditunjuk oleh Inggris maupun Belanda. Hal tersebut tentu terjadi konflik kepentingan yang berujung pada adu domba antar keluarga di keraton. Sultan seakan tidak memiliki wewenang apapun karena keputusan di tangan perwalian. Jika perwalian tidak mendapatkan persetujuan dari pihak Belanda maupun Inggris maka akan sia-sia keputusan yang dibuat. Langkah apapun harus menguntungkan

Belanda dan Inggris sehingga kedua penjajah tersebut meminjam tangan-tangan pejabat lokal yang pro terhadapnya.



Diagram 5 Masalah pemimpin boneka

Penggunaan istilah pemimpin boneka merujuk pada pemimpin yang peran, ucapan, sikap, dan tindakannya dikendalikan orang lain. Seperti yang dikatakan oleh Erving Goffman dalam analisis sosial menggunakan analisis panggung. Bahwa ada yang namanya front stage dan back stage yang kerap kali berbeda. Pemimpin boneka dalam perpolitikan kerap bermain watak, sekalipun dalam situasi genting bisa tertawa. Hal seperti itulah yang menurut Goffman disebut sebagai dramaturgi. Dua panggung itulah yang dimiliki politikus demikian. Panggung ketika berada di lingkaran publik dan panggung ketika di lingkaran sang sutradara. Narasi indah kerap dilontarkan di ruang publik untuk menarik dukungan. Namun yang perlu diingat bahwa politik butuh materi, masalah demikian kerap melibatkan tidak hanya kekuatan pengaruh, tetapi juga sokongan dana dari konglomerat yang juga memiliki agenda tersendiri. Timbulah konsekuensi dan kompensasi, nah disitulah bisa muncul istilah membonekakan diri (Abadi, 2021).

Pejabat Oportunis dan Mabuk Kekuasaan

Masalah lain yang dikemukakan dalam PD adalah pejabat oportunistis dan mabuk kekuasaan. Hal tersebut tercermin pada data PO.1 NPD.146, 199. Danurejo IV merupakan representasi pejabat oportunistis dan mabuk kekuasaan seperti yang dikatakan Engelhard bahwa Danurejo IV tidak menghamba pada Inggris yang telah memberinya jabatan sebagai patih. Ia diibaratkan sebagai kucing kampung yang berpindah-pindah agar mendapatkan makanan dengan cara apapun, baik menjilat maupun mencuri, secara tegas malah menyebut Danurejo IV sebagai kucing garong. Danurejo IV hanya mementingkan keuntungan yang didapatnya. Selain itu, Pangeran Diponegoro dan Pangeran Mangkubumi juga menilai Danurejo IV itu seperti wayang yang mabuk kekuasaan.

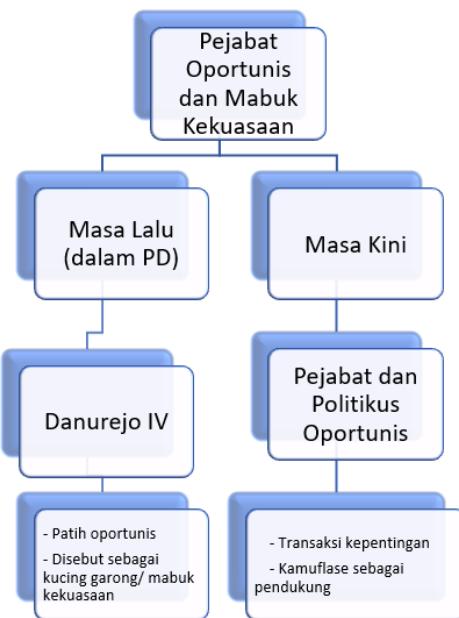


Diagram 6 Masalah pejabat oportunis dan mabuk kekuasaan

Apa yang diceritakan dalam PD tentu tidak asing di kehidupan nyata dengan banyaknya perpindahan politikus dari partai satu ke partai lainnya. Masyarakat tidak asing dengan hal seperti itu, permainan kepentingan menjadi dasar perpindahan politikus tersebut. Hal tersebut seolah transaksi kepentingan yang kerap terjadi baik dilakukan secara sembunyi maupun terang-terangan. Menurut Langgo (2025) oportunist bukan pemberontak, tidak membuat gaduh di luar pagar, mereka bisa datang lewat pintu depan, kamuflase sebagai pendukung, menjadi rekan, dan bisa juga menjadi pembisik keputusan. Oportunist menjadikan sistem kehilangan arah, menjual moral demi kesempatan, prinsip ditukar dengan proyek, kepercayaan diubah menjadi komoditas. Menurut Aji (2025) kekuasaan yang berfokus kepentingan pribadi memunculkan onani kekuasaan berupa kebijakan yang dibuat dengan kengawuran dan tidak ada urgensiya.

Fakta Fiktif dan Fakta Sejarah

Novel PD menyajikan fakta fiktif dan fakta historis melalui tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya hingga membentuk rangkaian cerita yang menarik. Hal yang dibahas dalam PD yang hubungannya dengan fakta fiktif dan fakta historis dapat dijabarkan melalui tabel berikut.

No.	Masalah	Tokoh	Kode	Halaman
1	Adat Istiadat Jawa	Ki Pujosubroto	AI.1	NPD.48
2	Penyakit Cacar	Raffles	PC.1	NPD.301
3	Mata-mata	Kiman	MM.1	NPD.425, 428, 429

Tabel 2 Fakta fiktif dan fakta sejarah dalam PD

Fakta fiktif dan fakta sejarah dalam PD dalam tabel 2 melingkupi peristiwa-peristiwa penting dari hal budaya, wabah penyakit, dan mata-mata. Penelitian ini difokuskan pada ketiga permasalahan tersebut.

Adat Istiadat Jawa

Tokoh Ki Pujosubroto bisa dianggap sebagai tokoh fiktif yang menjabarkan mengenai adat istiadat Jawa yang dianggap adi luhung waktu itu. Namun, mengenai adat istiadat Jawa bisa diartikan sebagai fakta sejarah mengenai tata upacara adat Jawa yang berlansung dari dulu hingga kini. Dalam PD adat istiadat Jawa terdapat pada data AI.1 NPD.48 diceritakan bahwa Pangeran Diponegoro bersikeras bahwa pernikahannya dengan Ratnaningsih akan dilaksanakan seperti rakyat biasa, bukan model keraton. Pertentangan keiginan Mangkarawati (Ibunda Pangeran Diponegoro) dengan Ontowiryo (Pangeran Diponegoro) semakin kuat karena argumen kuat dari masing-masing pihak.



Diagram 7 Masalah Adat Jawa

Di balik perbedaan pendapat tersebut, ternyata Pangeran Mangkubumi mengusulkan pada Mangkarawati untuk menghubungi tokoh ahli mengenai adat Jawa, perawi, pesastra, dan pakar budaya yang Bernama Ki Pujosubroto. Pada awalnya apa yang dikatakan Ki Pujosubroto dimentahi oleh Pangeran Diponegoro. Namun, berkat pengalaman dan pengetahuan luas serta gaya bicara Ki Pujosubroto yang begitu memesona maka pada akhirnya Pangeran Diponegoro luluh juga. Pertemuan di Tegalrejo bersama Ki Pujosubroto menghasilkan *win win solutions* karena pernikahan tetap menggunakan adat keraton dan dilaksanakan di Tegalrejo tempat Nenek Pangeran Diponegoro.

Hadirnya tokoh fiktif seperti Ki Pujosubroto menjadi penghubung cerita dalam PD yang membahas mengenai pernikahan Pangeran Diponegoro. Fakta sejarah muncul dalam bentuk adat pernikahan model Jawa yang masih eksis hingga kini. Bahkan, dalam PD dijelaskan pula mengenai perhitungan weton maupun neptu untuk memperhitungkan kecocokan pengantin secara adat.

Penyakit Cacar

Dalam PD juga disinggung mengenai penyakit cacar pada masa pemerintahan kolonial baik Belanda maupun Inggris. Hal tersebut terdapat pada data PC.1 NPD.301

yang menceritakan bahwa penyakit cacar terjadi selama enam periode sejak Gubernur Jenderal Overstraten, Siberg, Wiese, Daendels, Raffles, dan Van der Capellen. Di dalam PD sekilas dijelaskan bahwa adanya wabah tersebut pemerintah kolonial sudah berusaha memberikan pengobatan melalui dokter yang ditugaskan khusus, namun masyarakat lebih percaya pada dukun hingga akhirnya tidak tertolong dan mati. Cacar diceritakan banyak merenggut nyawa anak-anak muda.

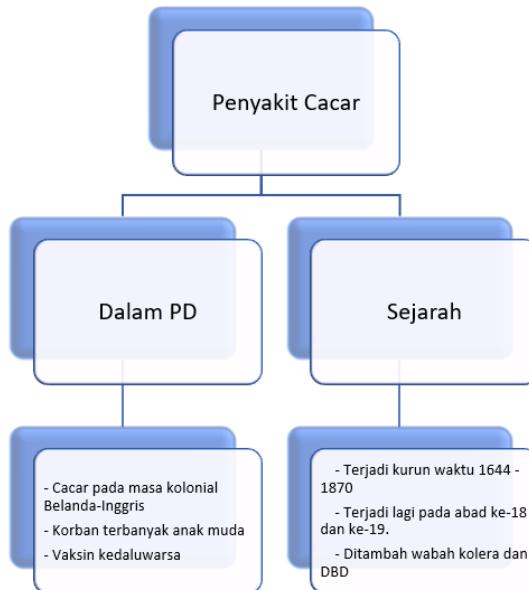


Diagram 8 Masalah penyakit cacar

Namun demikian, ada masyarakat yang menerima bantuan pengobatan cacar secara medis dengan diberi obat cacar berupa vaksin. Ironisnya vaksin yang diberikan banyak yang kedaluwarsa karena kurang jelinya para mantri. Obat yang tadinya bertujuan untuk menyembuhkan, berubah menjadi racun yang mematikan. Kematian para pasien tersebut kemudian ditutup-tutupi dalam laporan pada atasan mereka. Meskipun demikian, di dalam PD, beberapa laporan Raffles disebutkan bahwa penduduk Jawa yang berjumlah 4.490.900 diklaim hidup sejahtera dan sehat. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan fakta di lapangan.

Menurut Boomgraard (dalam Atok, 2022) penyakit cacar masuk pertama kali tahun 1644 di Jawa, tepatnya di Batavia. Kemudian cacar menyebar di Banten dan Lampung di tahun 1766. Tahun 1870 menyebar di Priangan, Bogor, dan Semarang. Menurut laporan dari Hogendrop di tahun 1781 di Batavia cacar menjangkiti lebih dari 100 orang dan 20 diantaranya meninggal. Penyebaran penyakit diperparah dengan masuknya aspek politis sehingga pemerintah kolonial cenderung abai dengan permasalahan tersebut. Pada abad 18 dan 19 tidak hanya penyakit cacar saja yang eksis, namun kolera juga mewabah. Bahkan, di Surabaya terjadi tiga wabah sekaligus, yaitu cacar, kolera, dan demam berdarah.

Mata-mata

Persoalan mata-mata dalam sebuah perjuangan melawan kolonialisme juga diceritakan dalam PD. Penceritaan tersebut melalui tokoh fiktif bernama Kiman yang secara tersurat dalam data MM.1 NPD. 425, 428, 429. Ketika Belanda sudah mulai menunjukkan gelagat tidak baik maka Pangeran Diponegoro sudah mempersiapkannya, bahkan banyak tokoh berikrar akan mendukungnya, seperti Pangeran Hadikusumo,

Demang Mulyosentiko, Demang Amat Ngemprah, dan rakyat yang terketuk hatinya untuk berjuang bersama. Namun, Danurejo IV pun tidak tinggal diam untuk mengetahui rencana tersebut dengan mengirimkan mata-mata bernama Kiman.

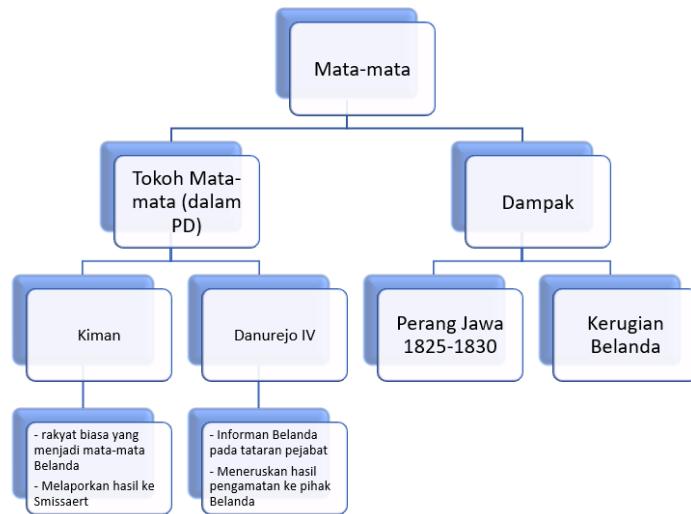


Diagram 9 Masalah mata-mata

Kiman melaporka hasil mata-matanya kepada Danurejo IV yang kemudian diteruskan pada Residen Belanda Smissaert dan mengatakan bahwa Pangeran Diponegoro berencana melakukan penyerangan pada bulan depan. Hasil laporan Kiman ini memicu kepanikan Belanda sehingga diadakan pertemuan mendadak yang dihadiri Smissaert, Danurejo IV, Chavelier, Wironegoro, dan Pangeran Mangkubumi. Smissaert kemudian memerintahkan Pangeran Mangkubumi untuk menemui Pangeran Diponegoro dalam rangka memastikan kebenaran apa yang dikatakan Danurejo IV beserta antek lainnya. Namun, sebenarnya Pangeran Mangkubumi mendukung langkah Pangeran Diponegoro. Hal tersebut dibuktikan dengan nasihat Pangeran Mangkubumi agar Pangeran Diponegoro berhati-hati dan mempersiapkan diri dengan menyuruh mengungsikan seluruh keluarga keluar dari Puri Tegalrejo. Tujuan pengungsian keluarga Pangeran Diponegoro adalah Selarong. Belum selesai Pangeran Mangkubumi berbicara, tiba-tiba pasukan Belanda sudah menyerang Puri Tegalrejo, saat itu pula Perang Jawa mulai berkobar di tahun 1825 – 1830. Perang Jawa merupakan perang dahsyat yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dan Belanda mengalami kerugian besar dalam Perang Jawa tersebut hingga 20 juta gulden, defisit tersebut kemudian menjadi latar belakang adanya sistis tanam paksa.

Sisi Edukatif

Sebuah karya sastra tidak semata hanya bersifat sebagai hiburan, namun ada sisi edukatif supaya manusia belajar dari kisah yang diceritakan. Seperti halnya PD menyajikan banyak sisi menarik sehubungan dengan pendidikan, dari sejarah bangsa, nasionalisme, dan juga implementasi pembelajaran. Sejarah mengajarkan bahwa perjuangan dalam meraih kemerdekaan butuh pengorbanan harta, jiwa, dan raga. Hal tersebut juga digambarkan dalam PD bagaimana kolonialisme membuat kesengsaraan rakyat sehingga perlawanan merupakan suatu keniscayaan. Setiap bangsa memiliki catatan sejarahnya sendiri dengan sudut pandang yang juga berbeda.

Sejarah Bangsa dan Nasionalisme

Pangeran Diponegoro merupakan salah satu pahlawan populer di Indonesia yang memiliki karisma tersendiri di hati rakyat. Kolonialisme Belanda yang semakin sewenang-wenang melahirkan Perang Jawa yang dipimpin Pangeran Diponegoro. Banyak pemicu perang tersebut, diantaranya adalah campur tangan Belanda dalam permasalahan yang terjadi di keraton, kemudian diperparah oleh Belanda yang menyerobot tanah nenek moyang Pangeran Diponegoro. Patok-patok tanah Belanda dicabut Pangeran Diponegoro dan pengikutnya sehingga Belanda mempunyai alasan menyerang Tegalrejo (tempat Pangeran Diponegoro bermukim) pada 20 Juni 1825. Perang tersebut meluas yang tadinya hanya di lingkup kecil, kemudian menyebar hingga ke daerah Jawa lainnya, seperti Banyumas, Kedu, Pekalongan, Semarang, Rembang, Magetan, Madiun, dan Kediri.

Akibat serangan Belanda tersebut, Pangeran Diponegoro membuat markas di Selarong sebagai basis pertahanannya. Di markas itulah, Pangeran Diponegoro menghimpun kekuatan bersama rakyat dan bangsawan yang sepemikiran. Adapun para pendukung kuat Pangeran Diponegoro, antara lain Kyai Mojo, Sentot Alibasyah, Prawirodirjo, dan Pangeran Mangkubumi. Perang selama lima tahun tersebut membuat Belanda kewalahan baik material maupun mental. Karena kesulitan mengalahkan Pangeran Diponegoro maka Belanda mengambil taktik curang dengan perundingan jebakan di Magelang pada 12 Maret 1830. Pangeran Diponegoro kemudian ditangkap dan diasingkan ke Manado, kemudian ke Makassar sampai wafat pada 8 Januari 1855 (Gunawan, 2025).

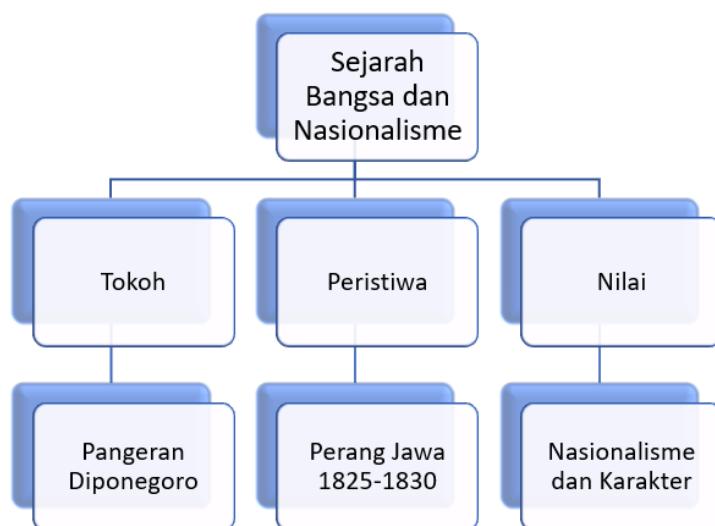


Diagram 10 Sejarah bangsa dan nasionalisme dalam PD

Melalui PD sejarah perjuangan bangsa bisa digali dengan cara lain yang bernilai sastra dengan mengedepankan semangat nasionalisme. Belajar sejarah dengan cara lebih menyenangkan, walau PD tetap sebagai karya fiksi, namun dengan latar belakang sejarah. Namun, perlu ditekankan bahwa dalam karya tersebut terdapat adanya fakta sejarah dan fakta fiktif yang saling bersinggungan. Dari novel tersebut juga mengajarkan karakter dari Pangeran Diponegoro yang berpegang teguh pada harga diri sebuah bangsa. Pendidikan karakter muncul dari sikap tegas dan tanpa kompromi terhadap kesewenang-wenangan yang menyengsarakan rakyat. Membaca PD membantu pembacanya bahwa nasionalisme merupakan kontinuitas bukan terkungkung pada masa lalu, namun menghidupkan nilai nasionalisme yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Trigatra Bangun Bahasa

Slogan pembinaan bahasa yang sudah akrab di telinga “Utamakan Bahasa Indonesia, Lestarikan Bahasa Daerah, Kuasai Bahasa Asing” relevan dengan PD. Di dalam PD terdapat banyak bahasa bercampur, dari bahasa Indonesia, Jawa, Tondano, Belanda, Inggris, dan Arab. Hal tersebut dihadirkan untuk menggambarkan kompleksitas tokoh-tokoh dalam novel tersebut. Bahasa dalam novel tersebut mewakili cara pandang tiap tokohnya dalam menempatkan diri, dengan siapa berbicara, dan dalam konteks apa digunakan.

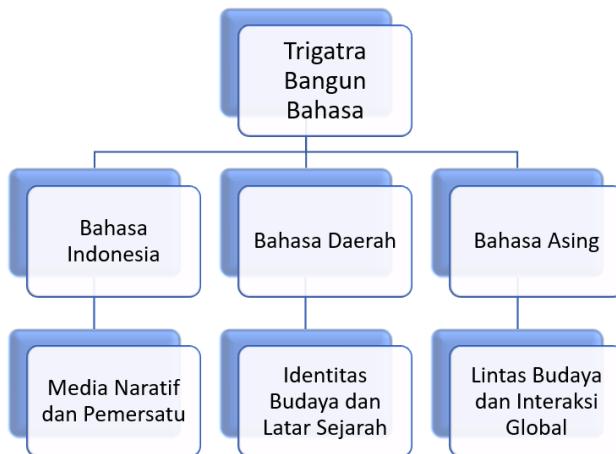


Diagram 11 Trigatra Bangun Bahasa dalam PD

Secara umum tentu menggunakan bahasa Indonesia di dalam PD, adapun bahasa lain yang digunakan dapat menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sudah terbiasa berhubungan dengan bangsa lain dan bersifat terbuka. Bahasa Indonesia diutamakan digunakan sehingga mudah dipahami pembaca, bahasa daerah juga digunakan sebagai pendalaman latar sejarah kejadian Perang Jawa, sedangkan bahasa asing digunakan untuk menunjukkan bahwa ada persinggungan dengan bangsa lain yang terlibat dalam konflik.

Hal tersebut sudah menunjukkan bahwa di dalam PD sudah dihadirkan trilogi bahasa yang sering digaungkan oleh Balai Bahasa. Sekali membaca PD maka akan belajar banyak bahasa. Hal positif lainnya adalah penggunaan bahasa daerah atau asing sudah ada catatan kakinya di dalam novel, sehingga pembaca akan mendapatkan gambaran utuh antara bahasa aslinya dan hasil terjemahannya. Beberapa catatan kaki bahkan memberikan konteksnya sehingga pembaca dimudahkan untuk menghubungkan antarperistiwa yang terjadi. Pembaca seolah dibawa ke masa lampau dengan dialog-dialog yang dihadirkan. Bahasa Indonesia digunakan sebagai media naratif dalam memupuk nasionalisme, bahasa daerah digunakan guna memperkuat identitas budaya dan konteks perjuangan, bahasa asing digunakan dalam rangka memperlihatkan realitas pemahaman lintas budaya.

Trigatra Bangun Bahasa itu berlandaskan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Bahasa Indonesia memiliki tempat khusus sebagai bahasa negara dan simbol pemersatu tanpa mengesampingkan bahasa daerah dan bahasa asing. Bahasa daerah tetap dilestarikan keberadaannya menjadi bibit ke-Indonesiaan-an. Bahasa asing juga perlu dikuasai untuk interaksi global, diplomasi, dan penguatan (Maryanto, 2023).

Simpulan

Novel Pangeran Diponegoro karya Remy Sylado menunjukkan bahwa sebuah sejarah bukanlah narasi tunggal. Namun PD menjadi ruang dialogis yang mampu memparodikan hubungan masa lalu dan masa kini. PD menyuguhkan parodi, ironi, hingga metafiksi historiografis untuk menunjukkan bahwa representasi sejarah selalu bersifat ganda, yaitu membangun sekaligus meruntuhkan. Dalam konteks PD tidak hanya merekonstruksi Perang Jawa, tetapi juga menghadirkan persoalan sosial-politik yang relevan di masa kini. Isu-isu populer seperti mafia tanah, mafia pajak, sentimen anti-Cina, gratifikasi seks, pemimpin boneka, serta pejabat yang oportunistis menjadi bukti bahwa problem masa lalu muncul kembali di masa kini dengan bentuk maupun tipe yang hampir sama. Adanya fakta sejarah dan fakta fiktif dipadukan secara kritis: tokoh fiktif berperan membuka konteks kultural, sedangkan fakta sejarah memberikan landasan faktual. Dari sisi edukatif, PD menyajikan pembelajaran mengenai sejarah bangsa, nilai nasionalisme, dan karakter kepemimpinan melalui Pangeran Diponegoro. Novel ini juga menyuguhkan keragaman bahasa sebagai pondasi Trigata Bangun Bahasa, memperkuat identitas budaya, kemudian membangun ruang pemahaman lintas bahasa. Pada akhirnya, novel tidak hanya sebagai karya sastra, tetapi sebagai sarana refleksi historis dan juga pendidikan karakter untuk pembaca di masa kini.

Implikasi penelitian ini terlihat dari kontribusinya pada kajian sastra sejarah dengan menyoroti relevansi hermeneutika secara kritis dalam membaca karya sastra sebagai ruang refleksi historis maupun edukatif. Penelitian ini juga meneguhkan posisi karya sastra sebagai media pembelajaran sejarah. Adapun keterbatasan pada penelitian ini terletak pada hanya satu teks sastra sehingga belum mampu membandingkan dengan lintas karya sastra maupun lintas periode sejarah.

Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah mengembangkan kajian komparatif dengan teks sastra lain, memperluas korpus, dan menggunakan pendekatan interdisipliner guna memperkaya pemahaman mengenai korelasi sastra dan sejarah.

Daftar Pustaka

- Abadi, S. (2021). *Pemimpin Boneka*. Forum News Network.
<https://fnn.co.id/post/pemimpin-boneka>
- Admin, A. (2024). *Gratifikasi Seksual: Ketika Gratifikasi Tak Hanya Materi*. Alchemist Group. <https://alchemistgroup.co/gratifikasi-seksual-ketika-gratifikasi-tak-hanya-materi/>
- Aji, W. T. (2025). *Onani Kekuasaan: Pengusa Adalah Maut*.
https://www.researchgate.net/profile/Wahyu-Trisno-Aji2/publication/390057136_Onani_kekuasaan_Pengusa_Adalah_Maut/links/67dd83b4e62c604a0df8d2f7/Onani-kekuasaan-Pengusa-Adalah-Maut.pdf
- Ardhianti, M. (2016). Kajian New Historicism novel Hatta: Aku Datang karena Sejarah karya Sergius Sutanto. *Buana Bastra: Bahasa, Susastra, Dan Pengajarannya*, 3(1).
<https://jurnal.unipasby.ac.id/bastr/a/article/view/652?utm>
- Atok, A. N. dkk. (2022). Wabah Cacar di Jawa Abad-19: Peran Pemerintah Kolonial dalam Menerapkan Vaksinasi. *Harmony*, 7(2), 98–105. <https://doi.org/10.15294/harmony>
- Azhari, M. R. dkk. (2024). *Kilas Balik Kerusuhan Mei 1998, Kerusuhan Berbau Rasial di Jakarta dan Solo*. Tempo. <https://www.tempo.co/politik/kilas-balik-kerusuhan-mei-1998-kerusuhan-berbau-rasial-di-jakarta-dan-solo-59631>

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/research-design/book255675%0A%0A>
- Fithri, W. (2014). Kekhasan Hermenutika Paul Ricouer. *Tajdid*, 17(2), 187–211.
- Gallagher, C., & Greenblatt, S. (2001). *Practicing New Historicism*. University of Chicago Press.
- Gunawan, H. A. (2025, November). Sejarah Pangeran Diponegoro, Sang Pahlawan Nasional Melawan Penjajahan Belanda. *Kumparan News*. <https://kumparan.com/hendro-ari-gunawan/sejarah-pangeran-diponegoro-sang-pahlawan-nasional-melawan-penjajahan-belanda-26B15rbe07N/full>
- Hadi, F. (2023). Mahfud MD Ungkap 11 Modus Mafia Tanah: Rumit, Polisi dan Kejaksaan Pusing! *Kumparan News*. <https://kumparan.com/kumparannews/mahfud-md-ungkap-11-modus-mafia-tanah-rumit-polisi-dan-kejaksaan-pusing-1zfUaZPtWTx/4>
- Hutcheon, L. (2004). *Politik Posmodernisme*. Jendela.
- Imayah, I., & Amrullah, I. (2024). Perjuangan tokoh nasional pra kemerdekaan dalam novel biografi Indonesia (kajian New Historicism). *Metafora: Jurnal Pembelajaran Bahasa Dan Sastra*, 11(1), 135–141. <https://doi.org/https://doi.org/10.30595/mtf.v11i1.21479>
- Kristanto, H. and Y. O. (n.d.). Fenomena Gratifikasi Seksual di Indonesia sebagai Bentuk Kejahatan Korupsi. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 6(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.36080/djk.1794>
- Langgo. (2025). *Ketika Pejabat Menjadi Naungan Penjilat*. Radar Kendari. <https://radarkendari.id/ketiak-pejabat-jadi-naungan-penjilat/>
- Li, X., & Segarra, et al. (2025). A bibliometric review and trend analysis of Shakespeare studies from 2000 to 2023: Interdisciplinary directions including New Historicism. *Humanities and Social Sciences Communications*, 12, 306. <https://doi.org/https://doi.org/10.1057/s41599-025-04664-8>
- Maryanto. (2023). *Membaca Trigatra Bangun Bahasa*. Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa. <https://badanbahasa.kemendikdasmen.go.id/artikel-detail/3955/membaca-trigatra-bangun-bahasa>
- Newton, K. M. (1997). Professing the Renaissance: The poetics and politics of culture. In *New Literary History* (pp. 15–36). Palgrave. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-1-349-25934-2_47
- Permadi, I. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Tanah Akibat Kejahatan Mafia Tanah. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(2), 308–323. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.6951>
- Purnama, I. D. (2025). *Mafia Tanah Tetap Ada Sampai Kiamat Kalau Pegawai BPN Mau Diajak Kongkalikong*. Okezone.Com. <https://economy.okezone.com/read/2025/11/17/320/3184029/mafia-tanah-tetap-ada-sampai-kiamat-kalau-pegawai-bpn-mau-diajak-kongkalikong>
- Putri, D. A. and F. U. N. (2021). Reformasi Perpajakan di Indonesia. *Jurnal Hukum Positum*, 6(2), 168–179. <https://doi.org/https://doi.org/10.35706/positum.v6i2.5825>
- Remy Sylado. (2008). *Pangeran Diponegero: Menuju Sosok Khalifah* (1st ed.). Tiga Serangkai.
- Ricoeur, P. (1981). *Hermeneutics and the Human Sciences*. Cambridge University Press.
- Ricoeur, P. (1991). *From Text to Action: Essays in Hermeneutics II*. Northwestern University Press.
- Sahliyah, C. (2025). Kajian New Historicism novel Kubah karya Ahmad Tohari. *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, 17(1).

- https://doi.org/https://doi.org/10.17509/bs_jpbsp.v17i1.6962
- Soetjipto. (2024). *Pecinan Semarang: Berawal dari Pemberontakan Tionghoa di Batavia*. Republik Merdeka Online Jateng. <https://www.rmoljawatengah.id/pecinan-semarang-berawal-dari-pemberontakan-tionghoa-di-batavia>
- Sugiarti, S. (2013). Analisis kritis New Historicism terhadap novel Indonesia modern dalam kerangka sejarah sastra. *Litera*, 8(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/ltr.v8i2.1210>
- Veeser, H. A. (Ed. . (1989). *The New Historicism*. Routledge.
- Wahyudi, F. (2019). *Pejabat dan Gratifikasi Seks*. Mahkamah Agung. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/suara-pembaca-badilag/suara-pembaca/pejabat-dan-gratifikasi-seks-oleh-firman-wahyudi-18-11>
- Wahyuni, S., & Burhan, F. (2023). Fakta sejarah dalam novel Kincir Waktu karya Akmal Nasery Basral: Kajian New Historicism. *Cakrawala Listra: Jurnal Kajian Sastra, Bahasa, Dan Budaya Indonesia*, 6(2), 195–214. <https://doi.org/https://doi.org/10.33772/cakrawalalistra.v6i2.2832>
- Widyatama, E. (2025). Ini 11 Kasus Pajak Terbesar di RI, 2 Mantan Bos Sedang Diperiksa. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20251126095808-128-688579/ini-11-kasus-pajak-terbesar-di-ri-2-mantan-bos-sedang-diperiksa>
- Wigarani, L. dkk. (2019). Kerusuhan Anti Tionghoa di Semarang Tahun 1980. *Journal of Indonesian History*, 8(2), 113–120. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jih%0D>